

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA GAMPONG (APBG) GAMPONG UJUNG KAMPUNG

THE EFFECT OF COMMUNITY PARTICIPATION AND TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS ON THE PREPARATION OF THE VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (APBG) OF UJUNG KAMPUNG VILLAGE

Elsya Nabila Putri¹

Email: elsyanabilaputrielsya@gmail.com

Khairita Hasbi²

Email: khairitahasbi@poltekkutaraja.ac.id

ABSTRACT

The goal of this research is to examine how community engagement and transparency affect the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBG) in Ujung Kampung Village, Samadua District, South Aceh Regency. This quantitative study uses a survey methodology with a Slovin selection algorithm and a 10% margin of error, surveying 74 participants. Multiple linear regression was used to analyze the relationship between APBG preparation and the independent variables of community participation and transparency. The findings show that community participation positively and significantly influences APBG preparation. Village budget management improves when the community actively participates in overseeing village funds. Other factors contributing to better APBG preparation include transparency from management. Transparency in the use of village funds is crucial to prevent budget anomalies and enhance community trust in the government. This research highlights the importance of inclusive discussions and the use of information technology for greater transparency in village fund management. A more transparent and participatory APBG process can increase accountability, foster community trust, and support sustainable village development.

Keywords: *Community Participation, Transparency, Management, APBG Preparation.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana keterlibatan masyarakat dan transparansi memengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Ujung Kampung, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metodologi survei dengan algoritma pemilihan Slovin dan margin kesalahan 10%, dengan melibatkan 74 peserta. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara penyusunan APBG dan variabel independen keterlibatan masyarakat serta transparansi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan

APBG. Pengelolaan anggaran Gampong menjadi lebih baik ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam mengawasi dana Gampong. Faktor lain yang mendukung penyusunan APBG yang lebih baik termasuk transparansi dari pihak pengelola. Transparansi dalam penggunaan dana Gampong sangat penting untuk mencegah anomali anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong. Penelitian ini menyoroti pentingnya diskusi yang inklusif dan penggunaan teknologi informasi untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana Gampong. Proses APBG yang lebih transparan dan partisipatif dapat meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan Gampong yang berkelanjutan.

Kata kunci: Keterlibatan Masyarakat, Transparansi, Pengelolaan, Penyusunan APBG.

A. PENDAHULUAN

Desa atau Gampong merupakan salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat dari akar rumput. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, keberadaan desa menjadi semakin sentral sebagai fokus pembangunan berbasis komunitas. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan mandat yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan mandat tersebut adalah **Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)**, yang berfungsi sebagai dokumen resmi perencanaan dan penganggaran tahunan desa.

APBG memiliki posisi yang sangat krusial dalam siklus pembangunan desa. Dokumen ini tidak hanya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi juga merefleksikan keputusan-keputusan strategis yang menyangkut prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya publik di tingkat desa. Oleh karena itu, penyusunan APBG harus menjamin adanya keterlibatan semua

elemen masyarakat desa dan dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan riil warga. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi masyarakat dan transparansi menjadi dua prinsip yang tidak bisa dipisahkan dari proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran desa. Keduanya berfungsi sebagai pilar untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara demokratis, efektif, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022).

Namun demikian, realitas pelaksanaan penyusunan APBG di berbagai desa di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ideal tersebut masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Dalam aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat sering kali masih bersifat simbolik atau hanya sekadar formalitas administratif. Warga desa memang diundang dalam musyawarah desa, namun keterlibatan mereka cenderung pasif dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir yang diambil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi warga terhadap mekanisme penganggaran, dominasi aparat desa dalam proses musyawarah, serta ketiadaan ruang dialog yang inklusif. Akibatnya, banyak program yang tercantum dalam APBG tidak sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat, sehingga efektivitas dan keberlanjutan pembangunan menjadi dipertanyakan (Dhiu et al., 2024).

Di sisi lain, transparansi dalam pengelolaan dana desa juga masih menjadi persoalan serius. Meskipun regulasi telah mewajibkan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi anggaran kepada publik, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Banyak desa tidak memiliki media atau kanal informasi yang memadai untuk menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan keuangan secara terbuka. Akses masyarakat terhadap dokumen APBG, realisasi anggaran, dan evaluasi program sangat terbatas. Dalam banyak kasus, informasi penggunaan dana hanya diketahui oleh aparat desa, tanpa pengawasan dari masyarakat atau lembaga adat. Situasi ini menimbulkan ruang yang rentan terhadap penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, dan praktik korupsi yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Karuh & Widyaningrum, 2024; Matia Andriani, 2019).

Kondisi tersebut juga tercermin secara konkret dalam studi kasus di Gampong Ujung Kampung, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun termasuk gampong dengan skala populasi yang relatif kecil, Gampong Ujung Kampung mengalami berbagai permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBG, khususnya dalam periode tahun anggaran 2021 hingga 2022. Berdasarkan observasi awal dan temuan dari warga setempat, proses penyusunan APBG di gampong ini dinilai tidak partisipatif. Warga mengaku tidak dilibatkan secara substansial dalam forum musyawarah desa, bahkan beberapa agenda pembangunan dianggap tidak sesuai dengan hasil usulan masyarakat. Selain itu, laporan realisasi penggunaan

dana desa tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap adanya praktik penyelewengan anggaran oleh aparat desa.

Permasalahan di Gampong Ujung Kampung bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Justru, hal ini mencerminkan kondisi sistemik yang banyak terjadi di berbagai desa di Indonesia. Banyak musyawarah desa hanya dijalankan sebagai agenda rutin tahunan, tanpa adanya upaya serius untuk menjadikan forum tersebut sebagai wadah demokrasi lokal. Selain itu, pelaporan keuangan desa yang seharusnya dipublikasikan secara berkala, sering kali hanya tersimpan di kantor desa tanpa bisa diakses oleh masyarakat. Lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak adanya lembaga pengawas independen, serta rendahnya kapasitas masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap anggaran desa semakin memperparah situasi ini.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian akademik yang komprehensif dan berbasis data empiris guna mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas penyusunan APBG. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas hubungan antara dua variabel tersebut dengan proses penganggaran di tingkat desa. Pemilihan Gampong Ujung Kampung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya indikasi kuat terjadinya praktik penyusunan APBG yang tidak partisipatif dan tidak transparan, yang dapat menjadi refleksi dari kondisi tata kelola desa di daerah lain. Penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat praktik partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

B. TINJAUAN TEORITIS

Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan Gampong merujuk pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap, dari tahap perencanaan hingga evaluasi anggaran. Pelibatan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam empat area: pengambilan keputusan, pelaksanaan, manfaat, dan penilaian (Yabutani & Yamada, 2023), sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1977). Anggota masyarakat lebih mampu

Transparansi

Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah Gampong dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana Gampong, termasuk rencana anggaran, pelaksanaan dan hasil penggunaan dana (Mendoza Ovando, 2020). Transparansi dalam pengelolaan APBG dapat diwujudkan melalui beberapa cara, seperti, publikasi rencana anggaran dan laporan realisasi melalui media informasi Gampong, publikasi rencana anggaran dan laporan realisasi melalui media informasi Gampong, penyediaan akses terhadap dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan Gampong, penggunaan teknologi informasi, seperti situs web atau aplikasi, untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. (Masyarakat et al., n.d.). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana Gampong (Sulistyowati & Nataliawati, 2022). Transparansi tidak hanya membangun kepercayaan

menyuarakan pendapat mereka dan mewujudkan harapan serta impian mereka jika mereka terlibat aktif dalam pengambilan keputusan (Hove et al., 2022). (Dhiu et al., 2024) menemukan bahwa partisipasi sangat penting dalam membuat program pembangunan yang didanai APBG terasa seperti milik mereka. Dalam konteks penyusunan APBG, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui mekanisme musyawarah memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap rencana anggaran (Harefa et al., 2022).

masyarakat, tetapi juga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran (Awung & Marchant, 2020).

Penyusunan APBG

Penyusunan APBG terdiri dari beberapa tahapannya meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Proses perencanaan APBG dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP-Gampong) yang merupakan dokumen acuan utama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan rancangan APBG yang akan dibahas melalui musyawarah Desa. (Ginting et al., 2024). Melalui partisipasi masyarakat dalam musyawarah tersebut, diharapkan setiap program yang didanai APBG benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Walean et al., 2021). Selain itu, pengawasan oleh masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran, sehingga penggunaan dana desa lebih optimal dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. (Putu Sarga, 2021).

Hubungan Antara Partisipasi

Masyarakat dan Transparansi dalam Penyusunan APBG

Partisipasi masyarakat dan transparansi merupakan dua elemen yang saling mendukung dalam pengelolaan APBG. Dalam konteks penyusunan

APBG, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui mekanisme musyawarah Gampong, dimana seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap rencana anggaran (Amalia Yunia Rahmawati, 2020). Transparansi menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif, sementara partisipasi masyarakat mendorong pemerintah Gampong untuk lebih transparan dalam pengelolaan antara variabel yang diteliti dianalisis menggunakan desain penelitian survei *eksplanatori*, data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang anggaran (Satria Mentari Tumbel, 2014). Kedua aspek ini secara bersama-sama dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan Gampong dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan dan keterbukaan masyarakat dalam pengelolaan dana Gampong memengaruhi proses perencanaan APBG, penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengukur hubungan kausal hubungan

didistribusikan kepada responden yang sesuai. Keterlibatan dan keterbukaan masyarakat merupakan variabel independen yang ingin dikarakterisasi dalam penelitian ini; variabel dependennya adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBG) (Cahyono & Mufidayati, 2021).

Keseluruhan 286 penduduk tetap Gampong Ujung Kampung dianggap sebagai bagian dari populasi penelitian. Responden harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar teknik purposive sampling dapat digunakan untuk menentukan sampel. Margin of error 10% dapat digunakan untuk menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel dapat ditentukan menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut:

$$N$$

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Batas toleransi kesalahan 10% atau 0,1
Ukuran sampel penelitian adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{286}{1 + 286 (0,1)^2} = \frac{286}{1 + 286 (0,01)} = \frac{286}{3,86} = 74,0932$$

Dengan demikian, tujuh puluh empat orang dianggap sebagai sampel dalam penelitian ini.

Berikut adalah persamaan untuk regresi berganda:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG)

α = Nilai Konstanta b

= Nilai Regresi

X_1 = Partisipasi Masyarakat

X_2 = Transparansi

e = Error (Tingkat Kesalahan)

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner terstruktur dengan skala likert untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, transparansi dan kualitas penyusunan APBG. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam penelitian. (Hasanah, 2022). Data dikumpulkan melalui:

1. Kuesioner: untuk mendapatkan data kuantitatif tentang variabel penelitian
2. wawancara: untuk menggali informasi tambahan dan memperkuat temuan kuantitatif

Untuk menentukan bagaimana keterlibatan dan keterbukaan masyarakat memengaruhi pengembangan APBG, penulis akan menerapkan analisis regresi linier berganda pada data yang diperoleh. Untuk mempermudah pada saat pengolahan data, penulis menggunakan singkatan Partisipasi (PT) dan Transparansi (TP) dalam jurnal ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

Dalam statistik, statistik deskriptif adalah alat untuk membuat data lebih mudah dipahami melalui analisis, penjelasan, dan penyajian. Statistik ini tidak digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi mengenai populasi, namun hanya untuk menggambarkan karakteristik data yang tersedia. (Merisa Oktaria & Alexandro, 2021). Hasil uji statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PT	74	5	25	14.46	4.650
TP	74	5	25	13.78	4.838
APBG	74	5	25	14.46	4.991

Berdasarkan tabel 4.1 hasil *statistic descriptive* Sebagai *breakout*:

1. Nilai mean PT Dan APBG hampir sama (14, 46), sedangkan TP memiliki nilai mean yang sedikit lebih rendah (13, 78).
2. Terlihat pada variabel APBG (standard devise 4,991) yang menunjukkan Bahwa score

- individual pada variabel ini lebih bervariasi dibandingkan kedua variabel lainnya.
3. Semua variabel mempunyai rentang nilai yang sama (minimal 5, maksimal 25), yang menunjukkan skala pengukuran yang seragam.

Uji Regresi Linear Berganda

Teknik analisis statistik yang dikenal sebagai Regresi Linier Berganda digunakan untuk menentukan dampak satu variabel dependen (Y) terhadap dua atau lebih variabel independen (X). Metode ini berguna dalam penelitian

kuantitatif yang mengandalkan data primer untuk menentukan kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen (Fajri & Julita, 2021). Persamaan berikut digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.2 Regresi Linear Berganda (X₁, dan X₂ Terhadap y)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.616	.828		.744	.460
	PT	.541	.124	.504	4.360	.000
	TP	.436	.119	.423	3.656	.000

a. Dependent Variable: APBG

Persamaan regresi berikut diturunkan dari hasil yang disebutkan di atas:

$$y = 0,16 + 0,541x_1 + 0,436x_2 + 0,1$$

Pembahasan Uji t

Dalam analisis statistik, uji-t merupakan alat yang berguna untuk membandingkan dua set data atau,

dalam analisis regresi, untuk menentukan pengaruh faktor-faktor independen terhadap variabel dependen. Signifikansi perbedaan atau korelasi yang ditemukan dalam sampel dapat dipastikan dengan penggunaan uji ini (Matia andriani, 2019). Berikut adalah tabel 4.3, yang berisi hasil uji-t:

Tabel 4.3 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.616	.828		.744	.460
	PT	.541	.124	.504	4.360	.000
	TP	.436	.119	.423	3.656	.000

a. Dependent Variable: APBG

Berikut ini adalah penjelasan berdasarkan data dalam tabel 4.3: Tabel 4.3 menampilkan hasil analisis yang melihat hubungan antara variabel independen dan dependen. Nilai koefisien regresi (B), hitung t, dan

signifikansi (Sig.) digunakan untuk tujuan ini. Di sini, PT (X₁) dan TP (X₂) adalah variabel independen, sedangkan APBG (Y) adalah variabel dependen.
 1. Pengaruh PT (X₁) terhadap APBG (Y)

Dengan asumsi semua variabel lain tetap sama, kenaikan satu unit pada PT akan mengakibatkan kenaikan setengah unit pada APBG (karena koefisien regresi untuk PT adalah $B = 0,541$). Variabel PT memengaruhi APBG secara signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 4,360, yang lebih tinggi daripada nilai t tabel (biasanya sekitar 1,984 untuk $df = n - k$ dengan $\alpha = 0,05$). Kami menolak H_0 dan menerima H_1 karena pengaruh PT pada APBG signifikan secara statistik, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$). Jadi, aman untuk mengatakan bahwa PT memengaruhi APBG secara positif dan signifikan.

2. Pengaruh TP (X_2) terhadap APBG (Y)

Dengan asumsi semua variabel lain tetap sama, peningkatan TP satu unit akan mengakibatkan kenaikan APBG sebesar 0,436 unit (nilai koefisien regresi: $B = 0,436$ untuk variabel TP). Selain itu, TP memengaruhi APBG secara

signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai t terhitung sebesar 3,656. Kita dapat menyimpulkan bahwa dampak TP terhadap APBG signifikan secara statistik karena nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel dan nilai signifikansinya adalah 0,000 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel TP memengaruhi APBG secara signifikan dan positif, karena H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Hasil uji- t menunjukkan bahwa PT (X_1) dan TP (X_2), dua variabel independen, memengaruhi APBG secara signifikan dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan baik PT maupun TP akan meningkatkan APBG secara signifikan. Selain itu dari nilai Beta (Standardized Coefisien) terlihat bahwa PT mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap APBG dibandingkan dengan TP, karena nilai Beta PT (0,504) lebih tinggi dibandingkan dengan Beta TP (0,423).

adalah untuk mengetahui apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan saat digunakan bersama-sama (pada waktu yang sama) (Ramzizah, 2020). Tabel 4.4 menampilkan hasil uji F:

UJI F

Saat melakukan analisis regresi, seseorang dapat menggunakan uji F, uji statistik, untuk menentukan apakah model tersebut signifikan secara statistik secara keseluruhan. Tujuan dari uji ini

Tabel 4.4 Hasil Uji f

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1485.173	2	742.586	158.232	.000 ^b
	Residual	333.206	71	4.693		
	Total	1818.378	73			
a. Dependent Variable: APBG						
b. Predictors: (Constant), TP, PT						

Hasil uji F diperoleh dengan nilai F sebesar 158,232 dan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,000, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4. Dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang diterima secara normal sebesar 0,05, nilai ini jauh lebih rendah. Model regresi penelitian ini signifikan secara statistik, yang memungkinkan kita untuk menolak hipotesis nol (H_0). Hal ini menunjukkan bahwa APBG dipengaruhi secara signifikan oleh variabel TP dan PT secara bersamaan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 yang tinggi dalam analisis regresi menunjukkan bahwa model tersebut bagus dalam membuat prediksi; Dengan kata lain, artinya variabel independen menyumbang sebagian besar varians dalam variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 rendah, artinya variabel independen yang digunakan

dalam model hanya menyumbang sebagian kecil dalam variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain yang lebih signifikan mungkin telah diabaikan (Ulfiyatin & Haryanto, 2023). Namun perlu diingat bahwa meskipun nilai R^2 tinggi bukan berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan kausal; itu hanya berarti hubungannya kuat (Fahisa & Afriyenti, 2023).

Selain itu, dalam model regresi berganda, Adjusted R^2 sering digunakan untuk mengakomodasi jumlah variabel independen yang digunakan. Adjusted R^2 lebih akurat dalam menilai efektivitas model karena mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam regresi dan menghindari bias yang terjadi jika terlalu banyak variabel yang dimasukkan ke dalam model. (Pahlevi et al., 2022). Tabel 4.5 menampilkan hasil uji Koefisien Determinasi.

Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.904 ^a	.817	.812	2.166

a. Predictors: (Constant), TP, PT

Tabel 4.5 menampilkan hasil analisis koefisien determinasi, yang menunjukkan bahwa variabel dependen (PT) memiliki hubungan kuat dengan variabel independen (TP dan PT) dalam model regresi penelitian ini. Konsistensi dan keakuratan model tetap terjaga meskipun telah memperhitungkan

banyaknya variabel independen, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,812 dan nilai R Square sebesar 0,817, yang menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sebagian besar variasi variabel dependen.

E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dana gampong, maka kualitas penyusunan APBG akan semakin baik. Masyarakat yang berpartisipasi aktif mampu menyuarakan kebutuhan riil Gampong sehingga anggaran yang disiapkan lebih sesuai dengan prioritas pembangunan. Transparansi pengelolaan dana Gampong juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan APBG.

Terbukanya akses terhadap informasi anggaran, laporan keuangan dan mekanisme pengambilan keputusan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Gampong. Transparansi yang baik memungkinkan masyarakat memahami bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apakah anggaran tersebut memenuhi kebutuhan Gampong. Kurangnya partisipasi dan transparansi dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan APBG. Beberapa diantaranya adalah penyalahgunaan anggaran, rendahnya kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah Gampong, dan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan riil Gampong.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa kebijakan dapat ditempuh untuk meningkatkan standar pengelolaan APBG, antara lain:

Pemerintah Gampog harus rutin mempublikasikan informasi anggaran melalui berbagai saluran komunikasi, seperti website Gampong, media sosial, atau papan informasi di balai Gampong. Pemerintah Gampong dapat mengembangkan aplikasi atau sistem informasi berbasis digital untuk transparansi anggaran, misalnya melalui portal Gampong berbasis web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi anggaran secara real-time.

Masyarakat harus diberikan peran yang lebih luas dalam melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan dana Gampong sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola anggaran di masa depan. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan APBG dapat lebih transparan dan partisipatif sehingga dapat mendukung pembangunan Gampong berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Membahas

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Studi di Desa Rainis Kecamatan Rainis. *Jurnal Governance*, 3(July), 1–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/in>

- dex.php/governance/article/view/45928
- Awung, N. S., & Marchant, R. (2020). Transparency in benefit sharing and the influence of community expectations on participation in REDD+ Projects: an example from Mount Cameroon National Park. *Ecosystems and People*, 16(1), 78–94. <https://doi.org/10.1080/26395916.2019.1698658>
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173–194. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>
- Dhiu, A., Sayang, S., & Kapa, S. (2024). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 5(1), 79–90. <https://doi.org/10.37478/jria.v5i1.3925>
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452>
- HARDIKA, M., PURTI, A. M., & SARI, D. P. P. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. *Accounting Journal*, 6(2), 193–204.
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002–1009. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2450>
- HASANA, N. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA. 9, 356–363.
- Hove, J., D'Ambruoso, L., Kahn, K.,

- Witter, S., van der Merwe, M., Mabetha, D., Tembo, K., & Twine, R. (2022). Lessons from community participation in primary health care and water resource governance in South Africa: a narrative review. *Global Health Action*, 15(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2021.2004730>
- Indonesia, R. (2019). QANUN KOTA BANDAACEH, 2019. *Qanun Nomor 1 Tahun 2019*.
- Karuh, M. M., & Widyaningrum, T. (2024). Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri. *Iblam Law Review*, 4(1), 682–692. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.378>
- Masyarakat, P., Lingkungan, P., & Pedesaan, L. (n.d.). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan : Studi Perbandingan di Lingkungan Pedesaan Yultan Demmanggasa STITEK Dharma Yadi Makassar , Indonesia Email : dyultan@yahoo.co.id Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan : .*
- Matia andriani. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 43–48. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Mendoza Ovando, C. (2020). What kind of transparency for the Church? Proposing operational transparency for processes, solutions and decisions in the Catholic Church. *Church, Communication and Culture*, 5(2), 210–234. <https://doi.org/10.1080/23753234.2020.1767508>
- Merisa Oktaria, & Alexandro, R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan APBDesa. *Edunomics Journal*, 2(2), 64–72. <https://doi.org/10.37304/ej.v2i2.3003>
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 5(3), 1480–1486.
- Putu Sarga, E. A. (2021). the Authority of the Village Consultative Body (Bpd) in Preparing the Village Revenue and Expenditure Budget (Apbdes) in Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency in 2020. *Ganesha Law Review*, 3(1), 11–24. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i1.250>
- Qanun Provinsi Aceh. (2003). *Zitteliana*, 19(8), 159–170.
- Ramzilah, M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Terhadap Pengawasan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 9(3), 1–8. <https://doi.org/10.47647/jsr.v9i3.156>
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.20>

- 21.5.1.15-27
- Satria Mentari Tumbel. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus desa Tumaluntung satu kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)*.
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811.
<http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/819>
- Ulfyatin, U., & Haryanto, H. (2023). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KETANEN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK. *Media Mahardhika*, 21(3), 456–469.
<https://doi.org/10.29062/mahardika.v21i3.641>
- Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–10.
- Yabutani, Y., & Yamada, N. (2023). Conditions facilitating the participation of residents of older apartment complexes in community activities in Japan: basic study on community support measures. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 22(1), 32–49.
<https://doi.org/10.1080/13467581.2021.2008399>